



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2025 - 2029**





# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2025 - 2029**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. Dyah Lukisari, M.Si.

NIP : 19661016 199203 2 006

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasar SK Gubernur Nomor 821.2/26/2022

Tanggal 14 Januari 2022

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Komplek Pertanian Tarubudaya, Jalan Gatot  
Soebroto, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, **01** September 2025  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Surat Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .	II-7
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-10
2.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	II-19
2.5. Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ..	II-21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRAYEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	III-5
3.3 Manajemen Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	III-7
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PANGAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	IV-31
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....	II-12
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....	II-16
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	II-19
Tabel 2.4	Angka Proyeksi Kebutuhan Beras .....	II-22
Tabel 2.5	Penyediaan CPPD DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 .....	II-24
Tabel 2.6	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Prioritas 1, 2 dan 3 Tahun Tahun 2020-2024 .....	II-25
Tabel 2.7	Capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 .....	II-26
Tabel 2.8	Capaian Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2021-2024 .....	II-27
Tabel 2.9	Persentase Stunting di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 .....	II-28
Tabel 2.10	Jumlah Timbunan Sampah dan Sampah Sisa Makanan di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....	II-29
Tabel 2.11	Perumusan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	II-33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	III-3
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....	III-5
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	III-6
Tabel 3.4	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....	III-8
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....	IV-5
Tabel 4.2	Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029 .....	IV-29
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....	IV-31
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	IV-32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .....	II-2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (BMSP) Provinsi Jawa Tengah .....	II-3
Gambar 2.3	ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Per Desember 2024 .....	II-8
Gambar 2.4	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Per Desember 2024.....	II-8
Gambar 2.5	Persentase PoU di Pulau Jawa Tahun 2020-2024.....	II-21
Gambar 2.6	Perbandingan Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras dan Angka Konsumsi Beras.....	II-23
Gambar 2.7	Persentase Kenaikan CPPD DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 .....	II-24
Gambar 2.8	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Prioritas 1, 2 dan 3 Tahun 2020-2024 .....	II-25
Gambar 2.9	Capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 .....	II-26
Gambar 2.10	Capaian Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2021-2024.....	II-27
Gambar 2.11	Persentase Stunting di Jawa Tengah Tahun 2019, 2021-2023 .....	II-29
Gambar 2.12	Grafik Persentase Sampah Pangan Sisa Makanan Dibanding dengan Timbunan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....	II-30
Gambar 2.13	Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.....	II-31
Gambar 2.14	Alur Pendirian KD/LMP .....	II-32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk mendapatkan pangan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 Undang - Undang Dasar 1945. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Tidak tersedianya pangan akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi belum lagi gejolak sosial dan politik yang terjadi pada masyarakat karena ketahanan pangan yang terganggu. Berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pembangunan ketahanan pangan selaras dengan salah satu ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2025-2029 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”, serta salah satu misi Gubernur Jawa Tengah terpilih yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan”. Dalam membangun ketahanan pangan di Jawa Tengah yang mana diukur dengan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Indek Ketahanan Pangan (IKP). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didukung oleh 3 aspek, yaitu Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan / Akses Pangan, serta Pemanfaatan Pangan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut adalah:

1. **Ketersediaan Pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan;
2. **Akses Pangan** adalah kemampuan kelompok, rumah tangga atau individu untuk memenuhi kecukupan pangan setiap saat baik dari produksi sendiri,

pembelian, pemberian/bantuan lain berdasarkan sumber daya (sosial, teknologi, finansial/keuangan, alam, manusia) yang dikuasai secara berkelanjutan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat;

- 3. Pemanfaatan Pangan** adalah proses penggunaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia, baik untuk konsumsi langsung maupun dalam bentuk produk olahan. Selain itu, pemanfaatan pangan juga mencakup upaya untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan pangan dengan cara yang efisien agar bisa bertahan lebih lama dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029. Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana di dalamnya terdapat penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun RENJA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **2. Tujuan**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tujuan:

- a. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DISHANPAN dengan RPJMD 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (lima) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

### **Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini. Serta uraian tentang identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kemudian ditelaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

### **Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

### **Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Serta memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

**Bab V. Penutup**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

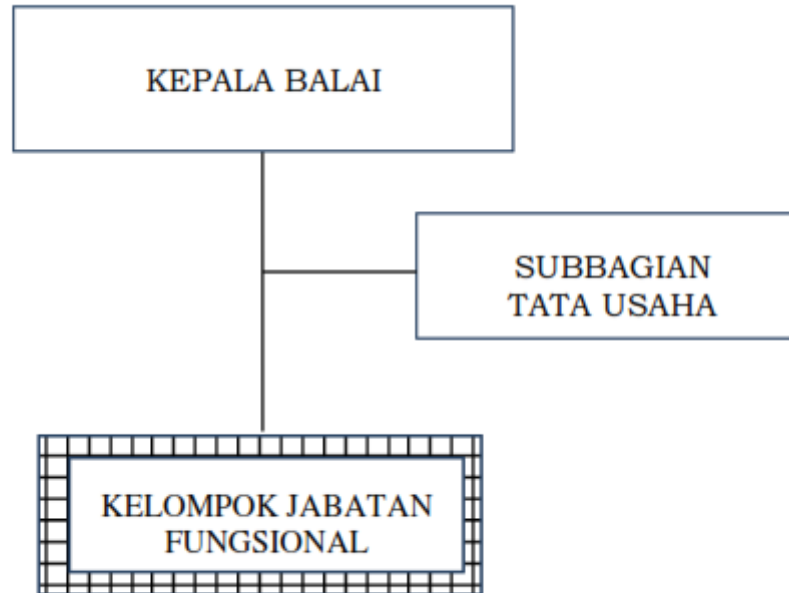
Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Sedangkan Organisasi UPT pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terlihat pada Gambar 2.2.

DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.2.**  
**Struktur Organisasi UPT Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan (BMSP) Provinsi Jawa Tengah**



Tugas pokok dan fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut.

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana tersebut diatas.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan perumusan e
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- b. Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

### **C. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi**

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **D. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **E. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan**

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal, bidang pengembangan konsumsi

pangan beragam bergizi seimbang dan aman, bidang promosi pangan dan keberagaman pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pangan dan Keberagaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pangan dan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Bidang Keamanan Pangan**

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama Keamanan Pangan.

Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama keamanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A**

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;

- b. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian pangan, sertifikasi mutu dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan teknis operasional sertifikasi organik;
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Pangan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- e. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

## **H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

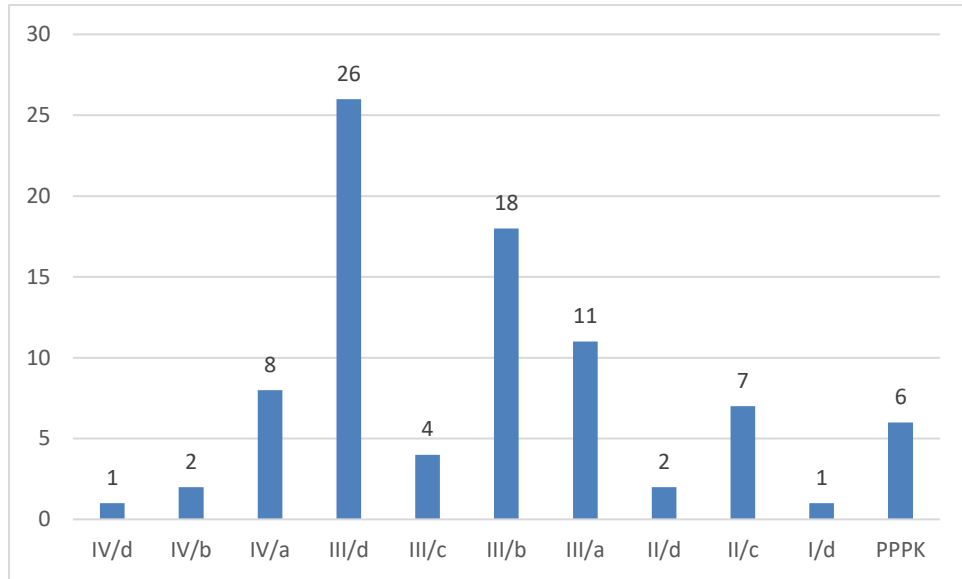
## **2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

### **A. Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 86 orang. Terdiri dari 7 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 3 orang eselon IV, 8 Sub Koordinator dan 51 jabatan fungsional umum dan 28 orang staf fungsional tertentu, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.3.).

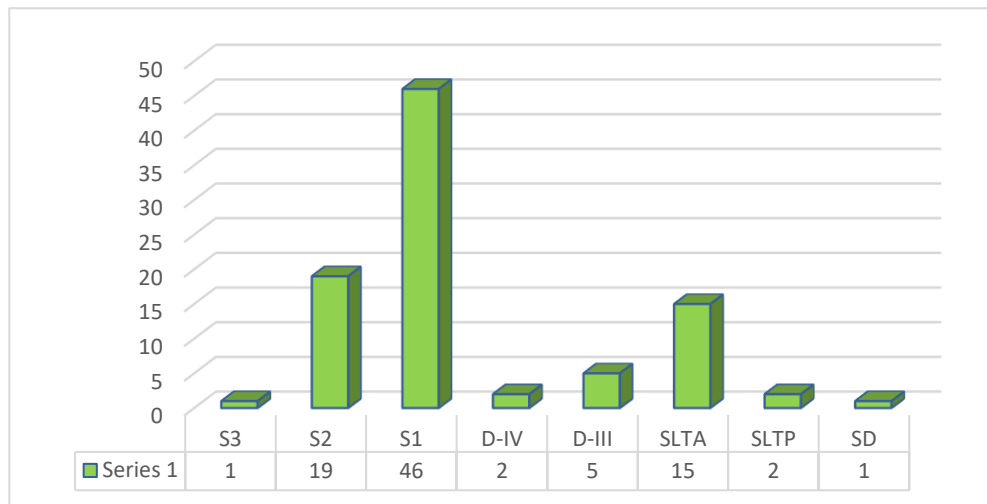
Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024 sebagai berikut:

**Gambar 2.3.**  
**ASN Berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan**  
**Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024**



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.4.**  
**Tingkat Pendidikan ASN Dinas Ketahanan Pangan**  
**Provinsi Jawa Tengah per Desember 2024**



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**B. Sarana dan Prasarana (Aset)**

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, gedung pertemuan/aula besar kapasitas kurang lebih 150 orang, Ruang rapat kecil 2 buah dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 30 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, gedung kantor gudang cadangan pangan 1 (satu), 1 (satu) gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), gudang cadangan pangan pemerintah 2 unit dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
2. Personal komputer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit, 54 (lima puluh empat) unit laptop, 22 (dua puluh dua) UPS, dan 52 (lima puluh dua) printer;
3. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan rincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
4. Televisi sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
5. Sebanyak 57 (lima puluh tujuh) AC split, 5 (lima) AC floor, 2 (dua) AC cassette dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan, dimana 8 (delapan) unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan;
6. LCD sebanyak 16 (enam belas) unit, 6 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan, Camcorder DVD 1 (satu) unit;
7. Kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebanyak 16 (enam belas) unit;
8. Kendaraan roda 2 (Sepeda motor) sebanyak 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
9. Rice Mill Unit (RMU) 3 (tiga) unit, dryer/pengering 1 (satu) unit, Cold Storage 1 (satu) unit;

10. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
11. Alat Pemotong Kertas 2 (dua) unit; Video Conference 1 (satu) unit, kursi rapat besi 70 (tujuh puluh), kursi eselon 5 (lima), televisi 4 (empat), dispenser 3 (tiga), bracket TV 3 (tiga), meja rapat 31 (tiga puluh satu), meja rapat pimpinan 2 (dua), genset kapasitas 140 KVA 1 (satu), UPS computer 3 (tiga), pallet plastik 30 (tiga puluh), router 1 (satu) set, Lemari es 1 (satu), Camera digital 1 (satu), CCTV 2 paket, Drone 1 (satu), Kursi putar staf 23 (dua puluh tiga), kursi hadap 2 (dua), Sound system gedung pertemuan baru 1 (satu) paket, Microphone kabel 2 (dua), microphone wireless 2 (dua), Sound system podcast 1 (satu) paket;
12. Pada BPMKP terdapat Filing Cabinet 1 (satu), Vacum Cleaner 1 (satu), AC split 4 (empat), UPS 10.000 VA Laboratorium BPMKP 1 (satu), Compressor Swan 1 (satu), Hand Blender Philips 1 (satu), Graphite Furnace 1 (satu), Lemari Pendingin/Kulkas 2 Pintu Samsung 1 (satu), Testing Milling Crown CTM-18 1 (satu), Micropipette 100-1000ul 1 (satu), Peralatan Laboratorium Set Toolkit 1 (satu), Rak Pengering Glassware 1 (satu).

### **2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui evaluasi kinerja tahun 2020-2024 dimana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pelaksana urusan pangan pada kurun waktu tersebut. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian dari target akhir Renstra yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari 10 (sepuluh) indikator kinerja *outcome*, 4 (empat) indikator tercapai 100% yaitu **Rasio Cadangan Pangan Masyarakat, Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP), Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah, Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)**, 6 (enam) indikator melebihi target antara lain **Rata-rata Ketercukupan Pangan, Rasio Penyediaan Cadangan pangan pemerintah provinsi, Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase penurunan**

**daerah rawan pangan dan gizi, Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan.**

Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menjadi landasan bagi penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	Renstra PD Tahun 2018-2023																			
01.00	Tujuan PD																			
	Skor PPH Konsumsi	Angka				87,72	88.08.00	88,44	88,8		87,1	86,67	94,4	94,2		98,8	98,4	106,74	106,08	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				70	70	78	76		81,94	81,15	89,5	91,5		115,93	116,43	114,75	120,4	
02.00	Sasaran PD																			
	PPH Ketersediaan	Angka				82,75	83	N/A	N/A		82,87	85,84	N/A	N/A		100,15	103,42	N/A	N/A	
	Angka Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari				2150	2150	2100	2100		2048	2054	2018	2025		95,26	95,54	96,1	96,43	
	Angka Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari				57	57	N/A	N/A		59,9	60,24	N/A	N/A		105,09	105,69	N/A	N/A	
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				70	70	78	76		81,94	82,75	88,75	80		117,06	118,21	113,79	105,27	
	Nilai SAKIP PD	Angka				80	80	80,01	80,02		89,67	89,73	89,64	85,05		112,09	112,17	112,04	106,29	
03.00	Program																			
	Ketersediaan Protein Pangan Beragam dan berkualitas	Gram/Kap/Hari				87,8	88	N/A	N/A		87,97	98,17	N/A	N/A		100,19	111,56	N/A	N/A	
	Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan berkualitas	Kkal/Kap/Hari				3730	3735	3731	4020		3732	3736	3797	4021		100,05	100,03	101,77	100,02	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	CV Harga Pangan Strategis Beras	%				5	5	4,5	2		1,1	0,57	2,14	0,58		454,55	877,19	210,28	344,83	
	CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah	%				28	27	N/A	N/A		23,53	9,47	N/A	N/A		119	285,11	N/A	N/A	
	CV Harga Pangan Strategis Cabai	%				43	42	N/A	N/A		49,3	17,01	N/A	N/A		87,22	246,91	N/A	N/A	
	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%				100	100	N/A	N/A		100	100	N/A	N/A		100	100	N/A	N/A	
	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat Kebutuhan Pangan	Angka				0,5	0,6	0,61	1		0,51	0,6	2,41	1,03		102	100	395,08	103	
	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	Angka				0,12	0,13	N/A	N/A		0,15	0,16	N/A	N/A		125	123,08	N/A	N/A	
	Konsumsi Pangan Beras	Kg/Kapita/Tahun				98,8	98,5	92,3	91,4		88,8	88,48	87,9	88,6		111,26	111,32	105	103,16	
	Konsumsi Kelompok Buah dan Sayur	Kg/Kapita/Tahun				84	85	N/A	N/A		90,6	86,88	N/A	N/A		107,86	102,21	N/A	N/A	
	Konsumsi Kelompok Pangan Hewani	Kg/Kapita/Tahun				31	32	N/A	N/A		32,8	33,51	N/A	N/A		105,81	104,72	N/A	N/A	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	%				90	90	80	80		97	90	80,79	86,38		107,78	100	100,99	107,98	
	Persentase Jaminan Mutu Pangan yang Diberikan	%				80	80	80	80		85,15	98,68	90,76	100		106,44	123,36	113,45	125	
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%				85	85	1	1		85,71	85	58,73	52,56		100,84	100	5873	5256	
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
B.	Renstra PD Tahun 2024-2026																			

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01.00	Tujuan PD																			
	Indeks Ketahanan Pangan	Skor								83					85,34					102,8193
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka								82					80,85					98,6
2	SASARAN PD																			
	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kapita/hari								3797					3805					100,2107
	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%								10					6,86					145,7726
	Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%								5					10,81					216,2
	Skor PPH provinsi	Skor								94,5					93,6					99,04762
	Indeks Manajemen Risiko	Angka								2,95					3,09					104,75
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka								82					91					110,98
3	PROGRAM																			
	Rata-rata ketercukupan pangan	Angka								1,25					2					160

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka								0,064					0,65					1015,625
	Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka								0,62					0,8					129,0323
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%								60					84					140
	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka								0,62					0,8					129,0323
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun								87,8					87,8					100
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun								87,8					87,8					100
	Persentase penurunan daerah rawan	%								0,01					0,12					1200

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	pangan dan gizi																			
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%								80					94,59					118,2375
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%								80					91					113,75
	Persentase tingkat Ketercapaian Perangkat Daerah	%								100					100					100
	Persentase tingkat Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%								100					100					100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase tingkat Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%								100					100					100

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	APBD pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BELANJA DAERAH	34.546.475	35.465.015	43.528.909	53.930.596	39.805.906	33.144.893	32.720.123	41.632.036	52.582.331	38.747.206	95,94	92,26	95,64	97,50	97,34	41,45	39,76
2	BELANJA OPERASI	33.491.275	34.724.493	40.030.709	52.055.296	36.919.956	32.191.913	31.985.606	38.178.051	50.744.537	36.060.597	96,12	92,11	95,37	97,48	97,67	39,44	37,83
3	BELANJA MODAL	1.055.200	740.522	3.498.200	1.875.300	2.885.950	952.980	734.517	3.453.985	1.837.794	2.686.608	90,31	99,19	98,74	98,00	93,09	201	193
4	TOTAL BELANJA	34.546.475	35.465.015	43.528.909	53.930.596	39.805.906	33.144.893	32.720.123	41.632.036	52.582.331	2.686.608	95,94	92,26	95,64	97,50	97,34	41,45	39,76

## 2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di daerah, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab penting untuk mengawal tiga pilar utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan. Namun, dalam implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi tugas dan fungsi tersebut

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah tersaji pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum Optimalnya Perwujudan Ketahanan	Belum Tersedianya Pangan Secara	Belum Sepenuhnya Kebutuhan Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pangan di Jawa Tengah	Mandiri di Jawa Tengah	Tercukupi Dari Produksi Jawa Tengah
			Masih Tingginya Ketergantungan Terhadap Impor Komoditas Pangan
			Belum Optimalnya Pengelolaan Cadangan Pangan di Jawa Tengah
			Masih Tingginya Ketergantungan Pada Bahan Pangan Tertentu
		Belum Optimalnya Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah	Fluktuasi Harga Pangan
			Masih Adanya Daerah Dengan Status Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Jawa Tengah Belum B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)
			Masih Adanya Pangan yang Belum Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan

## 2.5 Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (DISHANPAN) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam

kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan.

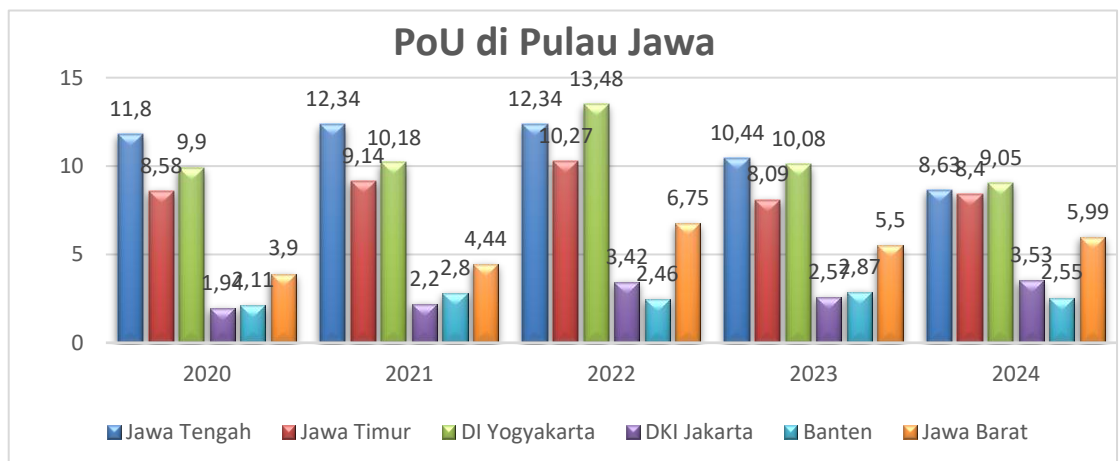
Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (Urgent, Serious and Growth).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Adalah Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil dari perhitungan PoU Provinsi Jawa Tengah terhitung tinggi di Pulau Jawa hal ini dikarenakan perhitungan susenas dimulai pada pandemi (Maret 2020) sedangkan pembatasan serentak dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020. Bagi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Provinsi Penyangga Lumbung Pangan Nasional hal ini bukan suatu indikator yang baik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan strategis guna menurunkan Persentase PoU di Provinsi Jawa Tengah. Berikut data time series persentase PoU di Jawa Tengah:

**Gambar 2.5**  
**Persentase PoU di Pulau Jawa 2020-2024**



## 2. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

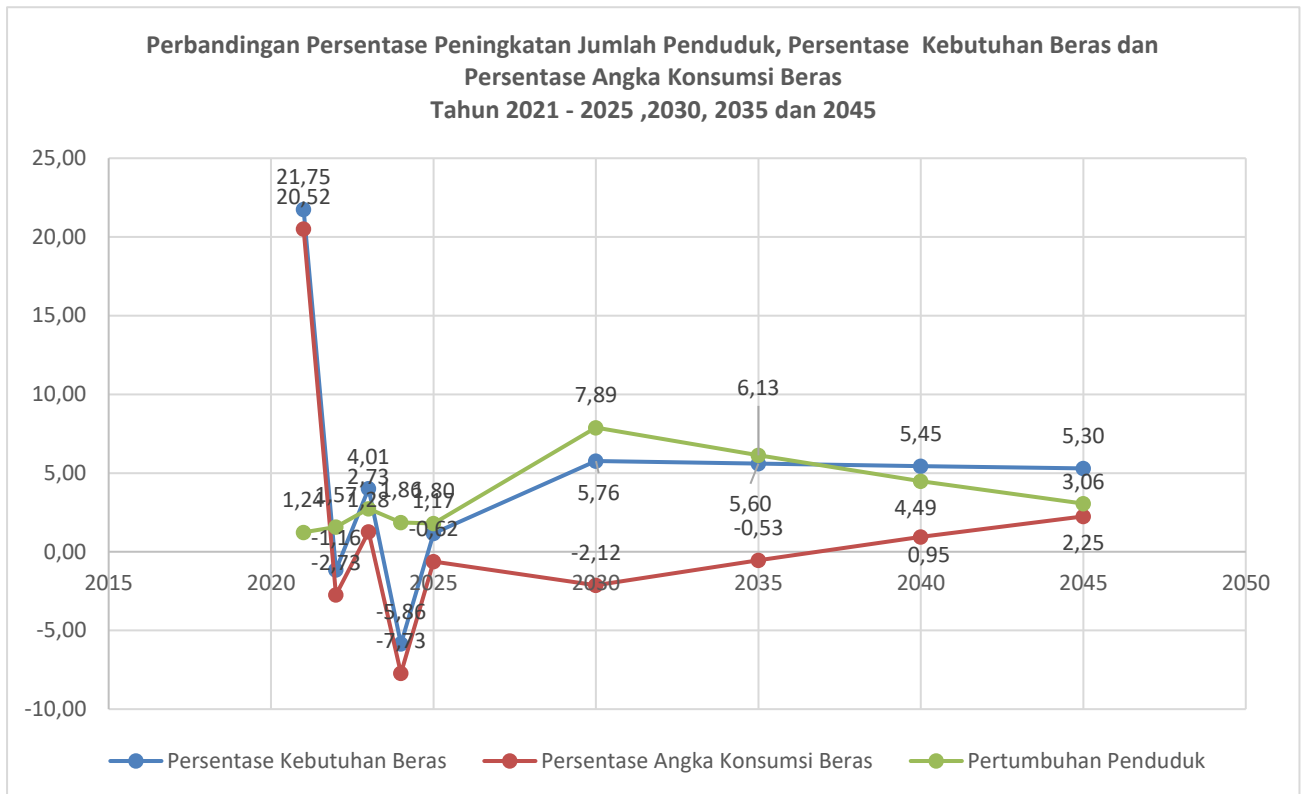
Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

**Tabel 2.4**  
**Angka Proyeksi Kebutuhan Beras**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Konsumsi Beras (Kg/Kap/Tahun)	Kebutuhan Konsumsi Beras (Kg/Tahun)
2020	36.516.035	97,19	3.549.096.904
2021	36.742.501	107,67	3.956.003.845
2022	37.032.410	106,21	3.933.150.545
2023	37.540.962	106,89	4.012.715.887
2024	37.892.283	102,84	3.896.936.219
2025	38.233.933	102,52	3.919.836.853
2030	39.771.480	101,44	4.034.340.020
2035	41.008.230	101,17	4.148.843.188
2040	41.939.540	101,65	4.263.346.356
2045	42.585.400	102,80	4.377.849.524

**Gambar 2.6**  
**Perbandingan Persentase Peningkatan jumlah penduduk,**  
**Kebutuhan Beras dan Angka Konsumsi Beras**



### 3. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Siang Gratis atau “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Pada saat kajian ini ditulis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) dan tim transisi Prabowo-Gibran menetapkan besaran anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025. Besaran ini dinilai telah memperhitungkan target defisit fiskal sebesar 2.29% - 2.82%.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tentu adalah program yang berdampak positif bagi masyarakat, sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa program Makan Gratis adalah tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi anak dan ibu hamil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia, khususnya masalah stunting pada anak. Dalam visi misinya, program Makan Siang Gratis termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

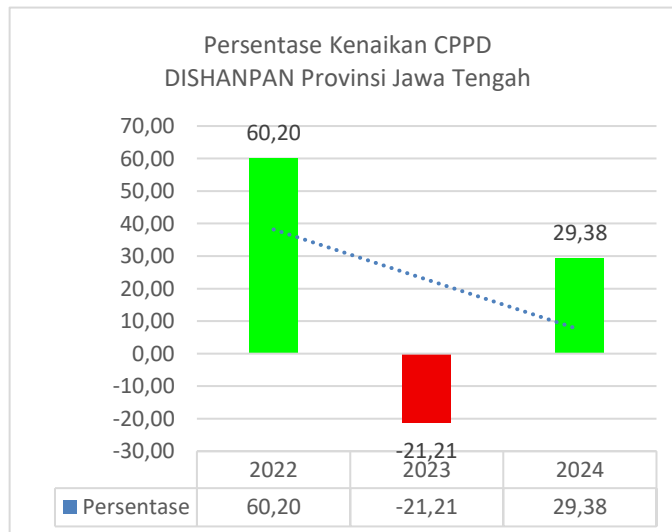
#### 4. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

**Tabel 2.5**  
**Penyediaan CPPD DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2021-2025**

Tahun	CPPD Yang Disediakan (beras) Ton
2021	198
2022	497,52
2023	410,45
2024	581,18

**Gambar 2.7**  
**Persentase Kenaikan CPPD**  
**DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah**  
**Dari Tahun 2022-2024**



#### 5. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana

distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

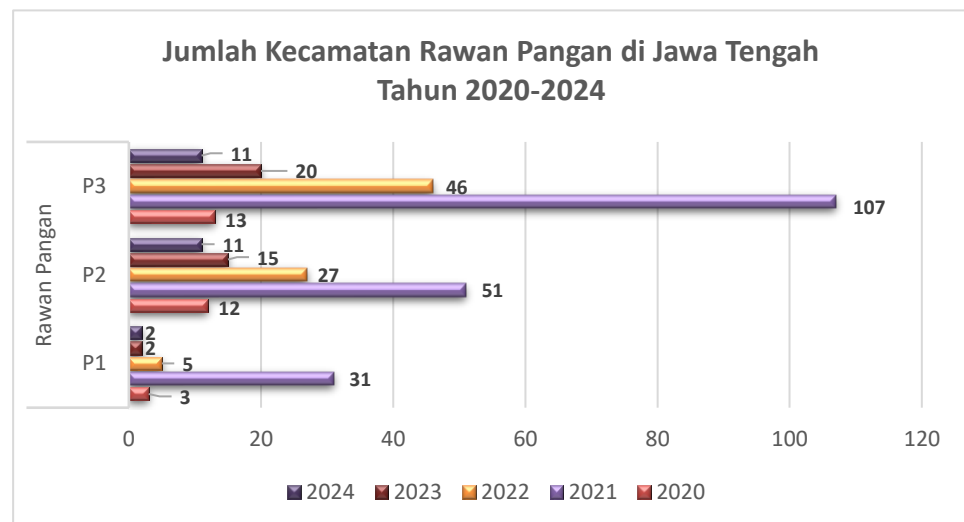
#### 6. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Prioritas 1,2 dan 3**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Rawan Pangan		
	P1	P2	P3
2020	3	12	13
2021	31	51	107
2022	5	27	46
2023	2	15	20
2024	2	11	11

**Gambar 2.8**  
**Jumlah Kecamatan Rawan Pangan Prioritas 1,2 dan 3**  
**Tahun 2020-2024**



#### 7. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah belum optimal yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan

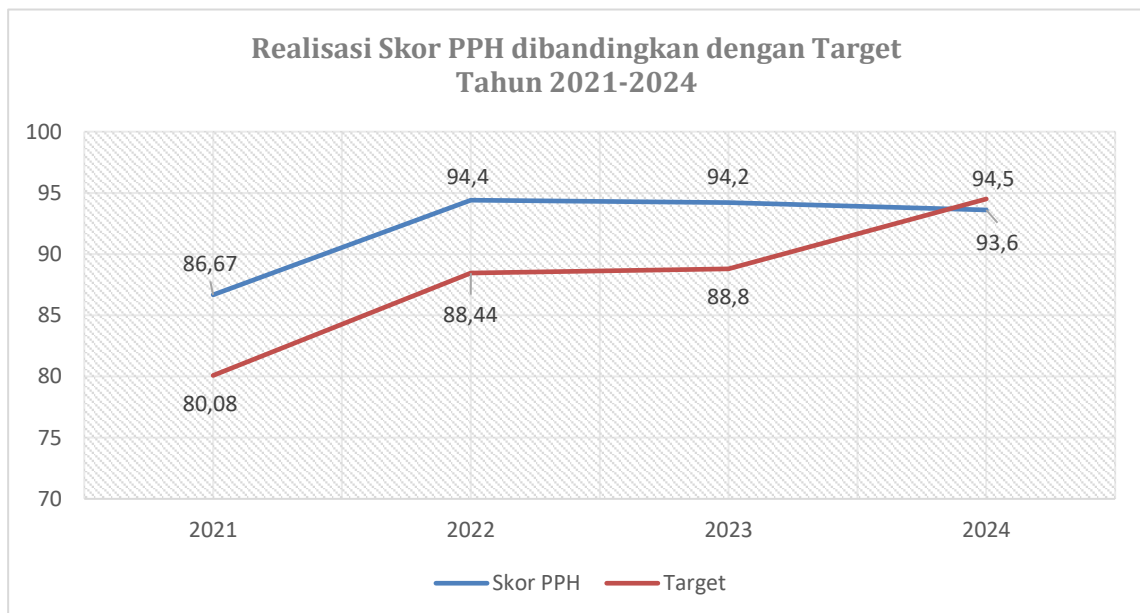
Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan di masyarakat antara lain : Permasalahan ekonomi yang menyebabkan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang berkualitas; Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA); hingga Pergeseran budaya konsumsi pangan masyarakat kearah pangan praktis dan siap saji.

Peningkatan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah sesuai kaidah B2SA berbasis pangan lokal dapat mengungkit taraf kesehatan masyarakat sekaligus mengembangkan ekosistem pangan yang lebih tahan dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada.

**Tabel 2.7**  
**Capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2021-2024**

Tahun	Skor PPH	Target
2021	86,67	80,08
2022	94,4	88,44
2023	94,2	88,8
2024	93,6	94,5

**Gambar 2.9**  
**Capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2021-2024**



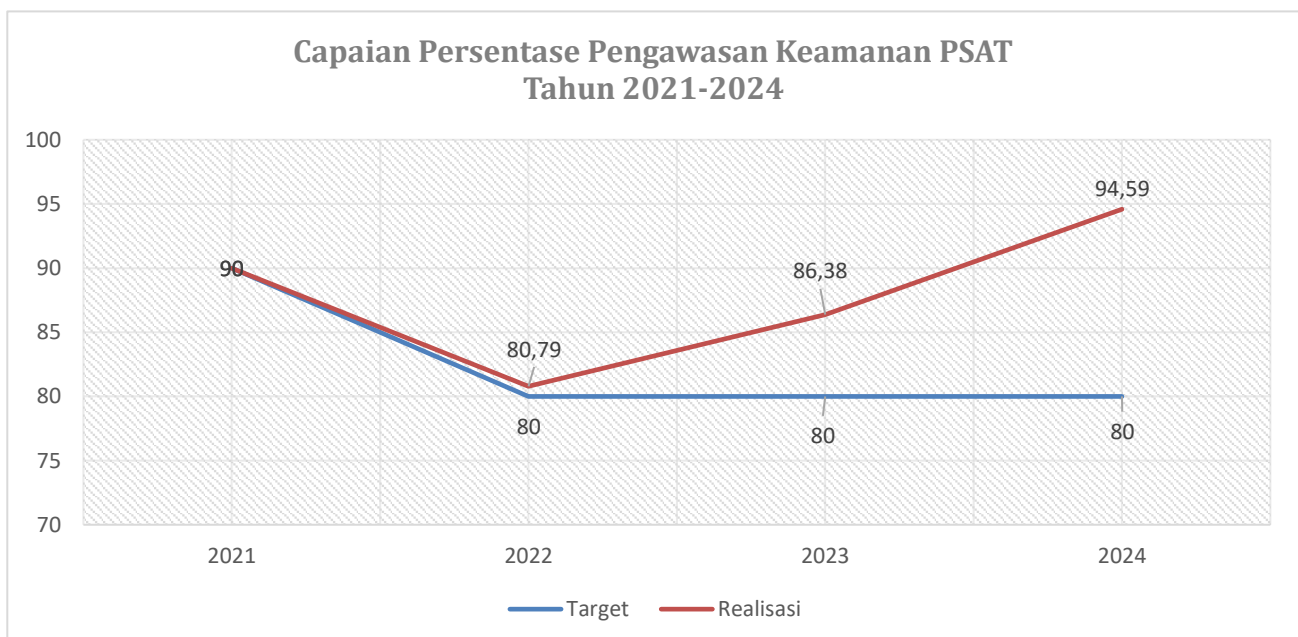
## 8. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

**Tabel 2.8**  
**Capaian Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2021-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	90	90	100
2022	80	80,79	100,99
2023	80	86,38	107,98
2024	80	94,59	118,24

**Gambar 2.10**  
**Capaian Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2021-2024**



## 9. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan , yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

## 10. Stunting

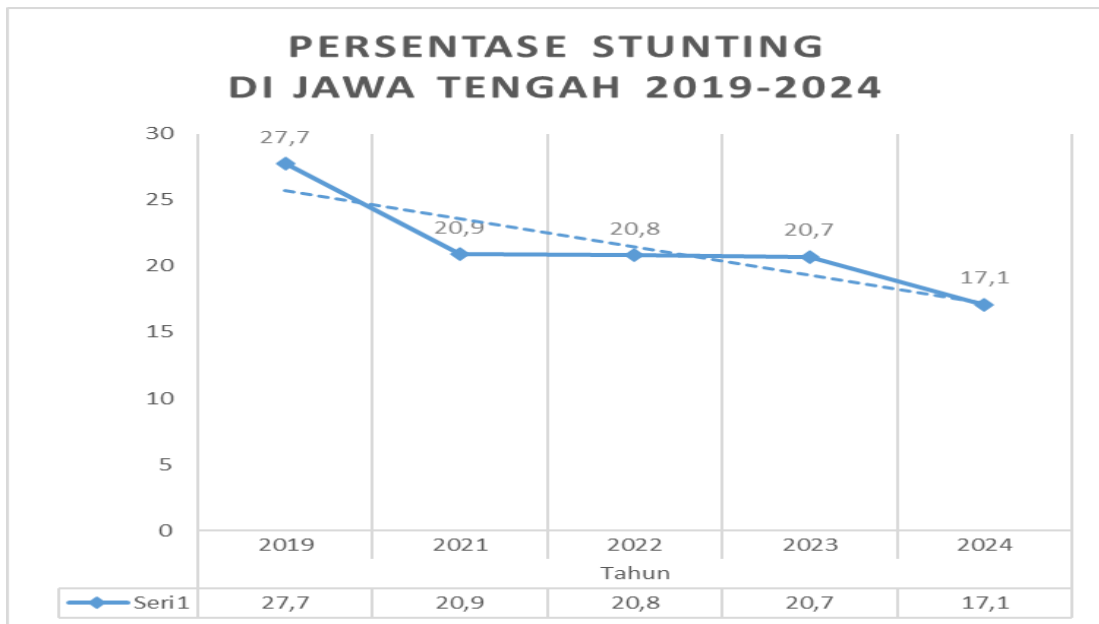
Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah menurut data SSGI dan SKI dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan sebesar 7% dari 27,7% menjadi 20,7%. Data penurunan prevalensi Stunting tertera pada tabel:

**Tabel 2.9**  
**Persentase Stunting di Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

No	Tahun				
	2019	2021	2022	2023	2024
1	27,7	20,9	20,8	20,7	17,1

**Gambar 2.11**  
**Persentase *Stunting* di Jawa Tengah Tahun 2019, 2021-2024**



#### 11. Food Loss and Waste

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, food waste atau limbah pangan terjadi di tingkat pasar ritel hingga di tingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyalahgunaan di rumah tangga. Food loss dan food waste Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, food loss dan food waste Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg perkapita pertahun yang seharusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

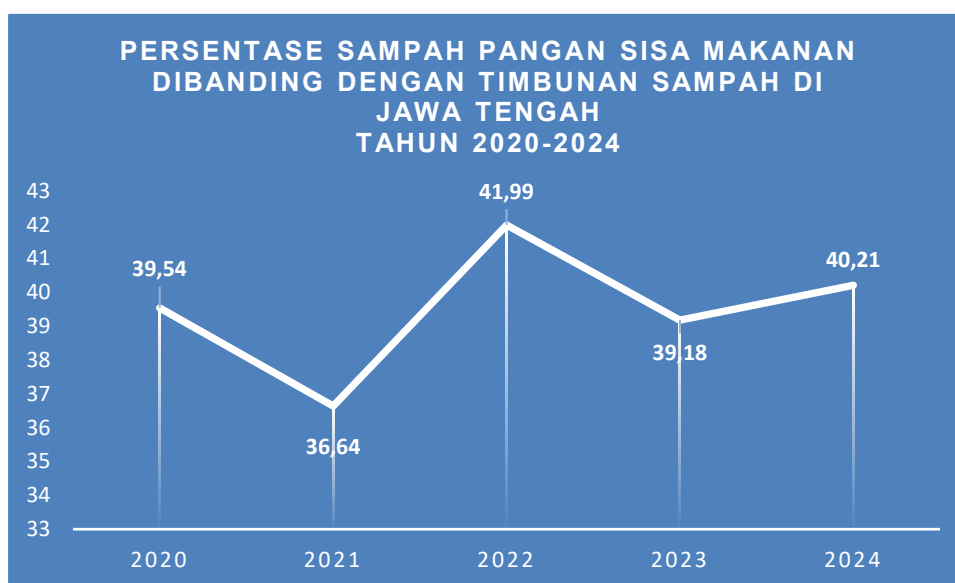
**Tabel 2.10**  
**Jumlah Timbunan Sampah dan Sampah Sisa Makanan di Jawa Tengah  
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Timbunan Sampah	Sampah Pangan Sisa Makanan

<b>2020</b>	4.236.201,25	1.674.993,974
<b>2021</b>	5.021.888,22	1.840.019,844
<b>2022</b>	5.904.061,1	2.479.115,256
<b>2023</b>	5.730.084,22	2.245.046,997
<b>2024</b>	3.530.896,21	1.419.773,366

**Gambar 2.12**

**Grafik Persentase Sampah Pangan Sisa Makanan Dibanding Dengan Timbunan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2020-2024**



## 12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di sekitar 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Koperasi ini direncanakan akan diresmikan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari

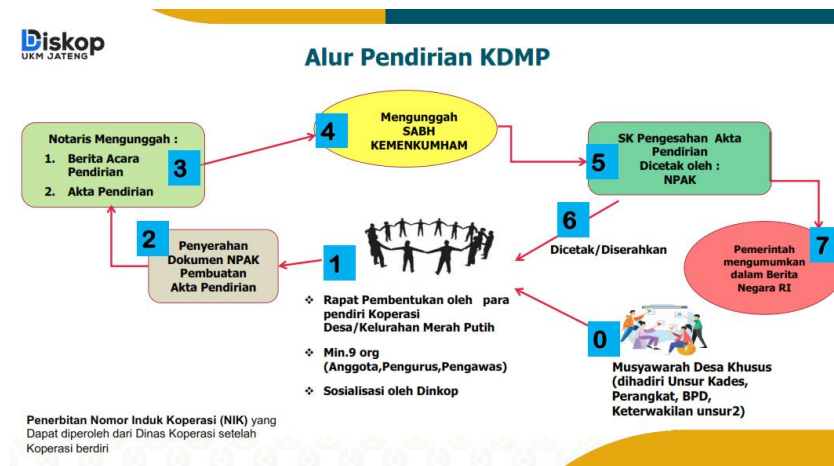
Koperasi Indonesia. Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

- Tujuan utama dari pembentukan Kopdes Merah Putih adalah:
  - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal.
  - Mengatasi Jeratan Pinjaman Online dan Rentenir: Memberikan alternatif pendanaan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.
  - Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa: Menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
- Pembentukan Kopdes Merah Putih didasarkan pada beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah, antara lain:
  - Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025: Mengatur tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih, termasuk tahapan sosialisasi, musyawarah desa, dan pengesahan badan hukum koperasi.
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Menjadi dasar hukum bagi pembentukan koperasi di Indonesia, yang mengutamakan asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi.
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan landasan bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat bersinergi dengan koperasi desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

**Gambar 2.13**  
**Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**



**Gambar 2.14**  
**Alur Pendirian KD/LMP**



Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran memberikan dukungan dan fasilitasi untuk memperkuat peran koperasi sebagai simpul distribusi pangan yang efisien dan stabil di tingkat desa, sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal yang berpihak pada petani dan konsumen

**Tabel 2.11**  
**Perumusan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan di Jawa Tengah 2. Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah 3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	1. Belum Tersedianya Pangan Secara Mandiri di Jawa 2. Belum Optimalnya Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah 3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	1. Alih fungsi lahan sawah 2. Perubahan iklim & fenomena cuaca ekstrem 3. Ketahanan air & infrastruktur irigasi 4. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) & hama penyakit 5. Penurunan produktivitas lahan & degradasi tanah 6. Keterjangkauan pangan & distribusi / logistik 7. Urbanisasi dan kepadatan penduduk 8. Akses Ekonomi dan Daya Beli 9. Keanekaragaman pangan dan diversifikasi komoditas 10. Keamanan dan Kualitas Pangan 11. Diversifikasi dan Pemanfaatan Pangan Lokal 12. Keanekaragaman pangan dan diversifikasi komoditas	1. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 2. Perubahan Iklim 3. Ketahanan Pangan 4. Konflik Sosial dan Ekonomi 5. Big Data	1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Bencana	1. Kemiskinan 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Bencana	1. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2. Ketersediaan pangan 3. Cadangan Pangan 4. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah 5. Kerawanan Pangan 6. Keamanan Pangan Segar 7. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 8. Stunting 9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan**

##### **A. Tujuan**

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan Skor Indeks Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut IKP.

*Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.

Dalam perhitungan Angka PoU yaitu dengan membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin; Menghitung *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER) dan *Coefficient Of Variation* (CV) dengan prosedur perhitungan MDER yaitu, 1). Menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas. 2) Menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian. 3) Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil sebesar 210 Kkal, dikalikan dengan angka kelahiran.

Perhitungan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) memiliki manfaat untuk memantau tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dalam suatu populasi secara berkala, Indikator ini dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam ketersediaan makanan dan keterjangkauan pangan oleh rumah tangga, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan subnasional.

Jika diamati secara global, angka ketidacukupan konsumsi pangan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Apabila hal ini terus terjadi tren meningkat setiap tahunnya maka ketidacukupan konsumsi pangan akan berdampak sangat serius khususnya terhadap masalah kesehatan yang nantinya berhubungan erat dengan sumber daya manusia pada generasi penerus bangsa, terutama kaitannya dengan kasus *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada anak.

IKP merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Dipilihnya indikator Skor IKP, karena dalam penyusunan Skor IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dua Belas indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP yaitu Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang), Rasio Ketersediaan Energi per Kapita per

Hari terhadap standar kebutuhan, Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, Rasio cadangan pangan beras Pemerintah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan, Persentase Penduduk dengan Kesejahteraan rendah, Koefisien Varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng), *Prevalence of Undernourishment*, Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Persentase keamanan pangan yang memenuhi standar (segar dan siap saji) terhadap total sampel, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, dan Prevalensi Balita *Stunting*. Semakin tinggi Skor IKP, maka semakin membaik kondisi ketahanan pangan pada wilayah tersebut.

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (PD).

## **B. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan, yang ditunjukkan dengan indikator Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan (%); Meningkatkan Pemanfaatan Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah; Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan dengan indikator Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras); dan Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan indikator Angka Ketersediaan Energi (AKE).

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Manajemen Risiko.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah		Skor Indeks Ketahanan Pangan	Skor	84.8	85.34	85.47	85.6	85.85	86.1	86.34	86.57	86.57
			PoU	Angka	10.44	8.63	8.23	7.83	7.43	7.03	6.64	6.25	6.25
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	N/A	10.81	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5
			Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	N/A	6.86	8	8	8	8	8	8	8
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah	Skor	94,2	93,6	94,2	94,5	94,55	94,58	94,6	94,63	94.63

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Angka	4021	3805	3600	3625	3650	3675	3700	3725	3725
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	79	79	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85	85	85.5	86	86.5	87	87.5	87.5
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	N/A	N/A	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.96

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan, dan 4). Keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Terwujudnya Ketahanan Pangan di Jawa Tengah	Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan di Jawa Tengah	Mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan, memenuhi kebutuhan pangan dalam daerah pangan dari produksi Jawa Tengah, mengoptimalkan cadangan pangan di Jawa Tengah, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan pokok tertentu	Mengoptimalkan Ketersediaan Pangan Yang Merata

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Masyarakat di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan daerah dengan status rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah</li> <li>2. Menstabilkan fluktuasi harga pangan strategis</li> </ol>	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan
	Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan di Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan prosentase pangan segar yang sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan</li> <li>2. Mengoptimalkan pola konsumsi pangan masyarakat jawa tengah sesuai kaidah B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman)</li> </ol>	Mengoptimalkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

**Tabel 3.3**  
**Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
1	2	3	4	5
PENGUATAN PANGAN YANG CUKUP, MERATA, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN	PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU PANGAN MELALUI MODERNISASI INFRASTRUKTUR PANGAN BERKELANJUTAN	AKSELERASI TATA KELOLA KEBIJAKAN DALAM PENGARUSUTAMAAN KONSUMSI PANGAN YANG EFISIEN, BERMUTU DAN BERBASIS POTENSI LOKAL	PEMANTAPAN POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN SERTA MENERAPKAN BUDAYA MAKAN YANG EFISIEN	PERWUJUDAN TATA KELOLA SISTEM PANGAN JAWA TENGAH YANG INKLUSIF, MERATA DAN BERKEADILAN

### 3.3 Manajemen Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (*risk register*), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang pada Tabel 3.2.

Kegiatan prioritas DISHANPAN pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Harga Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan pada daerah dengan *Prevalence of Undernourishment (PoU)* tinggi.
2. Subsidi Harga Pangan untuk Penanganan stunting di daerah dengan angka stunting tinggi.
3. Subsidi harga pangan untuk Produsen dan Konsumen guna untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah yang mengalami inflasi.

**Tabel 3.4 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Tujuan PD:</b>								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	-Prevalence of <i>Undernourishment</i> (PoU)  -Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup  - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah)  - Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	- Pemberian bantuan pangan dan penyaluran komoditas pangan secara kontinyu dan tidak hanya pada komoditas pangan strategis - Pemberian subsidi harga pangan untuk masyarakat rawan pangan dan anak berisiko stunting, kegiatan berbagi pangan, koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk penanganan di luar aspek pangan  - Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA yang lebih masif.	Kepala Dinas	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
						Penganekaragaman dalam mengkonsumsi pangan berbahan baku potensi pangan spesifik lokasi, Fasilitasi pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan pangan lokal. Gerakan cinta pangan lokal.		
		Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi  -Kuranginya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.	-Edukasi keamanan pangan di wilayah POU Tinggi -Pelaporan dan tindak lanjut hasil surveilan	Kepala Dinas	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Sasaran Strategis PD:</b>								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	- Koordinasi dengan Dinas Teknis Produksi untuk optimalisasi produksi komoditas pangan yang masih kurang - Pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan impor mendatangkan dari daerah lain baik domestik maupun luar negeri	Kepala Dinas	2025-2029
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025-2029
	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang	Kepala Dinas	2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
					level prioritas rendah	mebutuhkan bantuan di luar aspek pangan		
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	16	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.	Koordinasi dengan dinas teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal, Rakor analisis skor PPH dengan kabupaten/kota, Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA, Pengenalan pangan lokal substitusi beras dan gandum, promosi pangan lokal melalui media dan pameran, fasilitasi alat bagi pelaku usaha pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang lebih masif.	Kepala Dinas	2025-2029

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PANGAN**

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

#### **4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

##### **A. Rencana Program**

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, program dimaksud adalah:

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

##### **B. Kegiatan**

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi;
  - b. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan
  - c. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri

dari :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **C. Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sub Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
  - a. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- 2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - b. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi;
  - c. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi;
  - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
  - e. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  - f. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
- 3) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
  - a. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi;
  - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran

- Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- c. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
  - d. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
- 5) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan;
    - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
    - c. Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
    - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
    - e. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
  - 6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - c. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;
    - d. Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
  - 7) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan
    - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  - 9) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
  - 10) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  - 11) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 12) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 13) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 14) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

#### **D. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dalam rangka mengimplementasikan program prioritas urusan pangan antara lain aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), masyarakat miskin di daerah rawan pangan, balita berisiko stunting di daerah desa stunting, kelompok UMKM, kelompok wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dan pendanaan indikatif DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 untuk kegiatan publik sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah *											47,438,420,000		39,817,670,000		39,917,670,000		40,717,670,000		56,307,420,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) *	%	8.63		7.83		7.43		7.03		6.64		6.25	Dinas Ketahanan Pangan	
							Indeks Ketahanan Pangan *	Angka	85.34		85.6		85.85		86.1		86.34		86.57	Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan **										6,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		12,200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Angka Ketersediaan Energi (AKE) **	kkal/kepita/hari	3805		3625		3650		3675		3700		3725	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ***								6,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		8,200,000,000		12,200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Tercapaiannya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan ***	Angka	2		1.21		1.22		1.23		1.24		1.25	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ****							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan ****	Dokumen	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) ****						200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) ****	Dokumen	12	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) **	Angka	0.65	0.47	6,000,000,000	0.48	8,000,000,000	0.49	8,000,000,000	0.5	8,000,000,000	0.51	12,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi ****							6,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		12,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terselurkannya cpdp dalam rangka penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, bencana dan stabilisasi harga	persentase penyaluran cpdp ****	%	N/A	50	6,000,000,000	50	8,000,000,000	50	8,000,000,000	50	8,000,000,000	50	12,000,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ****						6,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		8,000,000,000		12,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara ****	Ton	581.18	450	6,000,000,000	500	8,000,000,000	500	8,000,000,000	500	8,000,000,000	500	12,000,000,000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan **										21,840,000,000		23,090,000,000		23,140,000,000		23,940,000,000		31,688,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras) **	%	6.86	8	14,190,000,000	8	15,440,000,000	8	15,490,000,000	8	16,290,000,000	8	21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ***								14,190,000,000		15,440,000,000		15,490,000,000		16,290,000,000		21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku ***	%	84	62.5	14,190,000,000	65	15,440,000,000	67.5	15,490,000,000	70	16,290,000,000	72.5	21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ****								14,190,000,000		15,440,000,000		15,490,000,000		16,290,000,000		21,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Jumlah Intervensi Harga	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP ****	%	100	100	10,390,000,000	100	9,390,000,000	100	9,390,000,000	100	10,190,000,000	100	12,500,000,000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi *****								10,390,000,000		9,390,000,000		9,390,000,000		10,190,000,000		12,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
						Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi *****	Laporan	N/A	2	10,390,000,000	2	9,390,000,000	2	9,390,000,000	2	10,190,000,000	2	12,500,000,000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI PASOKAN	VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN ****	Ton	1010.4	725	2,000,000,000	750	3,500,000,000	775	3,500,000,000	800	3,500,000,000	825	4,250,000,000	Polja Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya *****					2,000,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000		4,250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan		
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya *****	Laporan	N/A	3	2,000,000,000	3	3,500,000,000	3	3,500,000,000	3	3,500,000,000	3	4,250,000,000	Polja Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Pangan	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan ****	Angka	N/A	10	1,800,000,000	10	2,550,000,000	10	2,600,000,000	10	2,600,000,000	10	4,300,000,000	Polja Pascapangan dan Kelembagaan Usaha Pangan		
		2.09.03.1.01.0011			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi *****					1,800,000,000		2,550,000,000		2,600,000,000		2,600,000,000		4,300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan		
					Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan *****	Unit	N/A	50	1,800,000,000	50	2,550,000,000	50	2,600,000,000	50	2,600,000,000	50	4,300,000,000	Polja Pascapangan dan Kelembagaan Usaha Pangan	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	
						Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan **		%	10.81	8	7,650,000,000	6	7,650,000,000	6.25	7,650,000,000	6.5	7,650,000,000	6.75	10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN ***							7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
						Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan ***	%	N/A	14.6	7,650,000,000	13.6	7,650,000,000	12.6	7,650,000,000	11.6	7,650,000,000	11	10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi			
		2.09.04.1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi ****							7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		7,650,000,000		10,638,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi			
						Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI ****	%	12.12	6	4,436,000,000	6.5	4,436,000,000	7	4,436,000,000	7.5	4,436,000,000	8	5,514,000,000	Pokja Kerawanan Pangan			
		2.09.04.1.02.0002			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *****						100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi			
						Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Pokja Kerawanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi *****						4,336,000,000		4,336,000,000		4,336,000,000		4,336,000,000		5,414,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi			

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi *****	Laporan	N/A	2	4,336,000,000	2	4,336,000,000	2	4,336,000,000	2	4,336,000,000	2	5,414,000,000	Pokja Kerawanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Peningkatan Penyelamatan Pangan di Jawa Tengah	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkann *****	%	N/A	3	450,000,000	3.1	450,000,000	3.2	450,000,000	3.3	450,000,000	3.4	650,000,000	Pokja Penyelamatan Pangan	
		2.09.04.1.02.0003				Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi *****					450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		650,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
						Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi *****	Dokumen	N/A	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1	650,000,000	Pokja Penyelamatan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
						Terwujudnya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan masalah pangan dan gizi	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ****	Dokumen	N/A	12	2,764,000,000	12	2,764,000,000	12	2,764,000,000	12	2,764,000,000	12	4,474,000,000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02.0005				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi *****					2,764,000,000		2,764,000,000		2,764,000,000		2,764,000,000		4,474,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
						Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi *****	Dokumen	N/A	2	2,764,000,000	2	2,764,000,000	2	2,764,000,000	2	2,764,000,000	2	4,474,000,000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH   <b>Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan **										19,398,420,000		8,527,670,000		8,577,670,000		8,577,670,000		12,419,420,000	Dinas Ketahanan Pangan	
							Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah **	Angka	93.6	94.5	19,398,420,000	94.55	8,527,670,000	94.58	8,577,670,000	94.6	8,577,670,000	94.63	12,419,420,000	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
										2026		2027		2028		2029		2030				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT ***								4,492,500,000		4,492,500,000		4,542,500,000		4,542,500,000		5,767,500,000		Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Pengankar agaman dan Konsumsi Pangan	
						Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah ***	kg/kapita/tahun	87.8	87.3	4,492,500,000	87	4,492,500,000	86.6	4,542,500,000	86.3	4,542,500,000	86	5,767,500,000		Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Pengankar agaman dan Konsumsi Pangan	
		2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ****							3,542,500,000		3,542,500,000		3,542,500,000		3,542,500,000		4,717,500,000		Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Pengankar agaman dan Konsumsi Pangan	
						Terfasilitasinya Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal	JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI ****	Kelompok	25	10	2,955,000,000	10	2,955,000,000	10	2,955,000,000	10	2,955,000,000	10	4,130,000,000		Poljra Pengembangan Pangan Lokal	
		2.09.03.1.01.0007			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal *****						2,955,000,000		2,955,000,000		2,955,000,000		2,955,000,000		4,130,000,000		Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Pengankar agaman dan Konsumsi Pangan	
						Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal *****	Laporan	N/A	1	2,955,000,000	1	2,955,000,000	1	2,955,000,000	1	2,955,000,000	1	4,130,000,000		Poljra Pengembangan Pangan Lokal	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Penguatan Pangan B2SA Pada Kabupaten dan / Kota Di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA ****	%	N/A	42	587,500,000	42	587,500,000	42	587,500,000	42	587,500,000	42	587,500,000	Polja Pola Konsumsi Pangan B2SA	
		2.09.03.1.01.0006			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga *****					587,500,000		587,500,000		587,500,000		587,500,000		587,500,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekar agaman dan Konsumsi Pangan		
						Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga *****	Dokumen	N/A	1	587,500,000	1	587,500,000	1	587,500,000	1	587,500,000	1	587,500,000	Polja Pola Konsumsi Pangan B2SA	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi ****						950,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekar agaman dan Konsumsi Pangan		
						PELAKSANAAN EDUKASI DAN PROMOSI B2SA	Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal ****	Kali	N/A	7	950,000,000	7	950,000,000	7	1,000,000,000	7	1,000,000,000	7	1,050,000,000	Polja Promosi Penganekar agaman Pangan Lokal	
		2.09.03.1.04.0001		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal *****						950,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekar agaman dan Konsumsi Pangan		
						Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ****	Dokumen	N/A	5	950,000,000	5	950,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,050,000,000	Polja Promosi Penganekar agaman Pangan Lokal	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN ***							3,155,920,000		2,635,170,000		2,635,170,000		2,635,170,000		5,251,920,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan ***	%	N/A	90.1	3,155,920,000	90.2	2,635,170,000	90.3	2,635,170,000	90.4	2,635,170,000	90.5	5,251,920,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							3,155,920,000		2,635,170,000		2,635,170,000		2,635,170,000		5,251,920,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
						Terselenggaranya Pengawasan produk pangan segar yang teregistrasi di peredaran	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran ****	%	88.1	84	2,529,620,000	84	2,208,870,000	84	2,208,870,000	84	2,208,870,000	84	4,575,620,000	Polja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0008			Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						2,529,620,000		2,208,870,000		2,208,870,000		2,208,870,000		4,575,620,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
						Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan *****	Dokumen	N/A	1	2,529,620,000	1	2,208,870,000	1	2,208,870,000	1	2,208,870,000	1	4,575,620,000	Polja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN ****	Dokumen	1	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	152,300,000	Polja Penanganan Ketidaksesuaian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *****						146,300,000		146,300,000		146,300,000		146,300,000		152,300,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****	Dokumen	N/A	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	146,300,000	1	152,300,000	Poljra Penanganan Ketidaksiharian Mutu dan Keamanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
						Terlaksananya pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pangan pada Kelompok / Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan ****	Kelompok	N/A	50	480,000,000	50	280,000,000	50	280,000,000	50	280,000,000	50	524,000,000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****						480,000,000		280,000,000		280,000,000		280,000,000		524,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan	
						terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****	Dokumen	N/A	1	480,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000	1	280,000,000	1	524,000,000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	35 Kabupaten / Kota, JAWA TENGAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN ***								11,750,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar ***	%	N/A	40	11,750,000,000	40	1,400,000,000	40	1,400,000,000	40	1,400,000,000	40	1,400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
		2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							11,750,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
						Terbitnya rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan ****	%	91	80	400,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	80	500,000,000	Polja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	
		2.09.05.1.01.0007			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan ****						400,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
					Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan ****		Dokumen	119	50	400,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	Polja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	35 Kab/Kota, JAWA TENGAH
					Terbitnya LHU (Laporan Hasil Uji)	Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan ****		Dokumen	N/A	100	11,350,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	Polja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****						11,350,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
					Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ****		Dokumen	1	1	11,350,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	1	900,000,000	Polja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Ketahanan Pangan *											26,732,793,000		21,800,722,000		21,785,842,000		21,775,167,000		22,434,701,000			Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan *		Angka	79	75.6			75.7		75.8		75.9		76			Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan **										25,732,793,000		20,800,722,000		20,785,842,000		20,775,167,000		21,434,701,000		Dinas Ketahanan Pangan		
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan **	Angka	85	85.5	25,732,793,000		86	20,800,722,000	86.5	20,785,842,000		87	20,775,167,000	87.5	21,434,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								23,916,793,000		19,714,722,000		19,699,842,000		19,689,167,000		20,028,701,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan ***	%	86	87	23,916,793,000		87.5	19,714,722,000	88	19,699,842,000		88.5	19,689,167,000	89	20,028,701,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							15,850,000,000		15,850,000,000		15,850,000,000		15,850,000,000		15,850,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	N/A	15,850,000,000		N/A	15,850,000,000	N/A	15,850,000,000		N/A	15,850,000,000	N/A	15,850,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****							15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	98	111	15,000,000,000		111	15,000,000,000	111	15,000,000,000		111	15,000,000,000	111	15,000,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****							400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****					450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	12	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *****						120,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	1	1	120,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					100,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	2	2	100,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					20,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	4	4	20,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		X.XX.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****							10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah ****						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah ****	Laporan	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****						150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****	Dokumen	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							1,195,000,000		1,195,000,000		1,195,000,000		1,195,000,000		1,210,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	1,195,000,000	100	1,195,000,000	100	1,195,000,000	100	1,195,000,000	100	1,210,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000		90,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *****					60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000		700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	12	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						124,793,000		132,722,000		117,842,000		107,167,000		251,701,000	Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	70	10	124,793,000	10	132,722,000	10	117,842,000	10	107,167,000	10	251,701,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					124,793,000		132,722,000		117,842,000		107,167,000		251,701,000	Dinas Ketahanan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	70	10	124,793,000	10	132,722,000	10	117,842,000	10	107,167,000	10	251,701,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi SEMARANG
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							1,457,000,000		1,507,000,000		1,507,000,000		1,507,000,000		1,557,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	24	24	1,457,000,000	24	1,507,000,000	24	1,507,000,000	24	1,507,000,000	24	1,557,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						450,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		550,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	450,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	550,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						1,007,000,000		1,007,000,000		1,007,000,000		1,007,000,000		1,007,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	12	1,007,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							5,010,000,000		720,000,000		720,000,000		720,000,000		850,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	85	86	5,010,000,000	82	720,000,000	77	720,000,000	72	720,000,000	67	850,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					420,000,000		420,000,000		420,000,000		420,000,000		450,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	23	26	420,000,000	26	420,000,000	26	420,000,000	26	420,000,000	26	450,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					4,500,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	2	4,500,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	300,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					90,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2026		2027		2028		2029		2030				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi *****	Unit	60		60	90,000,000	55	100,000,000	50	100,000,000	45	100,000,000	40	100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAW AIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								1,816,000,000		1,086,000,000		1,086,000,000		1,086,000,000		1,406,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan ***	%	86		87	1,816,000,000	87.5	1,086,000,000	88	1,086,000,000	88.5	1,086,000,000	89	1,406,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1		1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1		1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *****						24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000		24,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	12	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****						30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						48,000,000		48,000,000		48,000,000		48,000,000		48,000,000		Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	12	48,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							0		100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Unit	20	0	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						0		100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000		Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	20	10	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							536,000,000		586,000,000		586,000,000		586,000,000		586,000,000		Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan		
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	24	24	536,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	24	586,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2026		2027		2028		2029		2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						250,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	12	250,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						286,000,000		286,000,000		286,000,000		286,000,000		286,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	12	286,000,000	12	286,000,000	12	286,000,000	12	286,000,000	12	286,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							1,090,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		320,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	11	11	1,090,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	11	320,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						1,000,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	1,000,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2026		2027		2028		2029		2030				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						90,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		120,000,000		Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rchabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****		Unit	10	10	90,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	120,000,000		SUB BAGIAN TATA USAHA	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan **										1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan	
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan **	Angka	N/A	2.92	1,000,000,000	2.93	1,000,000,000	2.94	1,000,000,000	2.95	1,000,000,000	2.96	1,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***								1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan ***	%	80	90	1,000,000,000	90	1,000,000,000	95	1,000,000,000	95	1,000,000,000	95	1,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
										2026		2027		2028		2029		2030					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100		100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****						500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Dokumen	5		5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Laporan	5		5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah ****						25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah ****	Data	N/A		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Ketahanan Pangan
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****						25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		Dinas Ketahanan Pangan		
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****	Dokumen	N/A		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		SUB BAGIAN PROGRAM	Dinas Ketahanan Pangan

**Tabel 4.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Daerah Tahun 2025-2029**

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Subsidi Pangan Murah	Fasilitasi Distribusi	BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI PASOKAN Target: 2025: 3 Laporan 2026: 3 Laporan 2027: 3 Laporan 2028: 3 Laporan 2029: 3 Laporan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1. Disperindag Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten dan Kota
		Subsidi Pangan Murah untuk Produsen dan Konsumen	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi Target: 2025: 2 Laporan 2026: 2 Laporan 2027: 2 Laporan 2028: 2 Laporan 2029: 2 Laporan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1. Disperindag Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten dan Kota 3. JTAB (BUMD)

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
2	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Sport Center)	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal pada Kecamatan Berdaya	Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Target: 2025: 1 Laporan 2026: 1 Laporan 2027: 1 Laporan 2028: 1 Laporan 2029: 1 Laporan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	1. Dinas Yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten dan Kota

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan

**Tabel. 4.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Pangan	84,8	85,34	85,47	85,6	85,85	86,1	86,34	86,57	
2	<i>Prevalence Of Undernourishment</i>	10,44	8,63	8,23	7,83	7,43	7,03	6,64	6,25	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	79	75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	76	

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Keterangan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	45,9%	65,43%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	94,2	93,6	94,2	94,5	94,55	94,58	94,6	94,63	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	N/A	N/A	15,6	14,6	13,6	12,6	11,6	11	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	N/A	N/A	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung Tujuan “Mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan”.

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat di reviu, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Diharapkan anggaran yang dialokasikan selama lima tahun mendatang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung pemenuhan target indikator kinerja utama, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir periode.

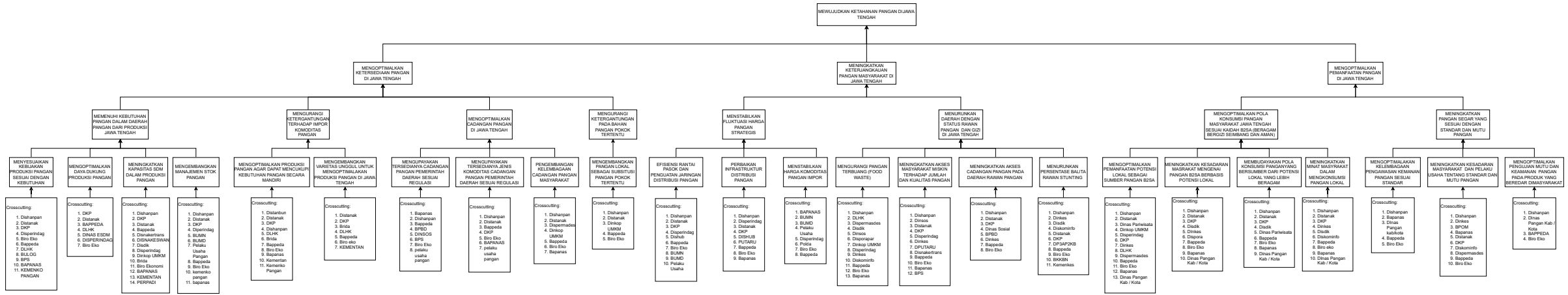
Renstra Tahun 2025-2029 ini agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

### **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**



**Ir. Dyah Lukisari, M.Si.**  
**NIP. 19661016 199203 2 006**





**Tabel Identifikasi Risiko**

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	-Prevelence of Undernourishment (PoU) -Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	Strategis OPD	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) - Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	Masyarakat Jawa Tengah

				Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Strategis OPD	-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi -Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.	Masyarakat Jawa Tengah
2	Sasaran Strategis PD	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	Strategis OPD	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	Masyarakat Jawa Tengah

		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	Strategis OPD	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Desa rawan pangan
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	Strategis OPD	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.	Masyarakat Jawa Tengah

**Tabel Analisis Risiko**

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Bekum Ada	Uraian	Memadai/Belum memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	3	5	15	Ada	- Pemberian bantuan pangan - Pemberian harga subsidi pangan - Penyaluran pangan dari daerah surplus ke daerah minus bekerjasama dengan pelaku usaha dengan biaya fasilitasi distribusi pangan - Sosialisasi/ edukasi pangan B2SA dan Diversifikasi pangan lokal	Belum Memadai	3	4	12
Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	3	5	15	Ada	-Edukasi keamanan pangan -Surveilans ke pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan	Belum Memadai	3	4	12

Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	4	4	16	Ada	- Koordinasi bersama dinas terkait untuk pemantauan ketersediaan pangan di lapangan baik dari sisi hulu maupun hilir - Analisa Ketersediaan Pangan secara berkala untuk mengetahui komoditas yang masih kurang pemenuhannya. Analisa dilakukan bersama dengan BPS selaku Pembina Data	Belum Memadai	4	3	12
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	4	5	20	Ada	Intervensi harga	Belum memadai	4	4	16
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	4	3	12	Ada	Subsidi harga pangan	Belum memadai	3	3	9
Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih	4	5	20	Ada	Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah, Promosi pangan B2SA dan	Belum memadai	4	4	16

dibawah/di atas angka konsumsi ideal					pangan lokal, Lomba cipta olahan pangan lokal, Lomba sekolah cerdas pangan, promosi melalui video/poster/pameran.				
--------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

**Tabel Risiko Prioritas**

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup</li> <li>- Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah)</li> <li>- Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA</li> </ul>	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan
Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi</li> <li>-Kurangannya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan</li> </ul>	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.
Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Kepala Dinas	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih,	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam

			kedelai, gula dan minyak goreng.	daerah belum mencukupi
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Kepala Dinas	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah
Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	16	Kepala Dinas	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.

**Tabel Rencana Tindak Pengendalian**

<b>Tujuan/Sasaran Strategis PD</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Target Waktu Penyelesaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Tujuan PD</b>								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	-Prevelence of Undernourishment (PoU) -Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	- Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup - Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) - Pola konsumsi masyarakat	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	- Pemberian bantuan pangan dan penyaluran komoditas pangan secara kontinyu dan tidak hanya pada komoditas pangan strategis - Pemberian subsidi harga pangan untuk masyarakat rawan pangan dan anak berseiko stunting, kegiatan berbagi pangan, koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk penanganan di	Kepala Dinas	2025-2029

				belum menerapkan B2SA		<p>luar aspek pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA yang lebih masif. Penganekaragaman dalam mengkonsumsi pangan berbahan baku potensi pangan spesifik lokasi, Fasilitasi pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan pangan lokal. Gerakan cinta pangan lokal.</li> </ul>		
		Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Minimalnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi</li> <li>-Kurang nya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi</li> </ul>	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Edukasi keamanan pangan di wilayah POU Tinggi</li> <li>-Pelaporan dan tindak lanjut hasil surveilan</li> </ul>	Kepala Dinas	2025-2029

				komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan	pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk.			
<b>Sasaran Strategis PD</b>								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	- Koordinasi dengan Dinas Teknis Produksi untuk optimalisasi produksi pangan yang masih kurang - Pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan impor mendatangkan dari daerah lain baik domestik maupun luar negeri	Kepala Dinas	2025-2029
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis	16	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2025-2029

		mengalami fluktuasi tajam						
	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2025-2029
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah/di atas angka konsumsi ideal	16	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.	Koordinasi dengan dinas teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal, Rakor analisis skor PPH dengan kabupaten/kota, Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA, Pengenalan pangan lokal substitusi beras dan gandum, promosi pangan lokal melalui	Kepala Dinas	2025-2029

						media dan pameran, fasilitasi alat bagi pelaku usaha pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang lebih masif.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--